

PERAN GURU EKONOMI LULUSAN PPG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMA

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam¹, Elisabeth Nutrilia Nil², Lutfianah leyli³, Sitti
Rahmaniar Ardithia⁴

Universitas Negeri Makassar

Email: a.zulitsnayarti.mardhanisyam@unm.ac.id¹, nutrilianil@gmail.com²,
lutfianah295@gmail.com³, srahmaniarardithia@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam eskalasi kualitas sumber daya manusia, di mana guru menjadi determinan utama dalam keberhasilan transfer pengetahuan. Selain bertransformasi sebagai penyampai materi, guru memegang tanggung jawab strategis dalam membimbing serta mengonstruksi karakter peserta didik. Sebagai langkah penguatan profesionalisme, Pemerintah menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berfokus pada standarisasi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi guru ekonomi lulusan PPG terhadap peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa guru ekonomi lulusan PPG memiliki peran signifikan dalam mengoptimalkan kualitas instruksional, terutama melalui pengembangan desain pembelajaran yang sistematis, penerapan metodologi yang variatif, serta penciptaan iklim kelas yang lebih interaktif. Lulusan PPG dinilai memiliki kesiapan yang lebih matang dalam mengontekstualisasikan materi ekonomi dengan realitas sosial, sehingga mempermudah asimilasi pemahaman siswa. Kendati demikian, efektivitas ini masih dihadapkan pada tantangan struktural, meliputi keterbatasan sarana prasarana, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan disparitas kualitas pendidikan antarwilayah.

Kata Kunci: Program Pendidikan Profesi Guru, Guru Ekonomi, Kompetensi Guru, Kualitas Pembelajaran.

ABSTRACT

Education serves as a fundamental instrument in enhancing the quality of human resources, with teachers acting as the primary determinants of successful learning outcomes. Beyond the delivery of instructional content, educators bear the strategic responsibility of guiding and molding student character. To bolster professional standards, the government initiated the Teacher Professional Education Program (PPG), designed to fortify pedagogical, professional, social, and personal competencies. This study evaluates the contribution of PPG-certified Economics teachers in elevating the quality of instruction at the senior high school level. Adopting a qualitative approach through a literature review, secondary data from scholarly journals and official documents were synthesized using data reduction, presentation, and conclusion-drawing techniques. The findings indicate that Economics teachers who have completed the PPG program play a pivotal role in optimizing instructional quality, specifically through the development of structured lesson plans, the application of diverse methodologies, and the cultivation of a more engaging learning environment. PPG graduates demonstrate superior readiness in contextualizing economic theories with real-world social conditions, thereby facilitating better cognitive assimilation for students. However, systemic challenges persist, including infrastructural limitations, a lack of advanced professional development, and the uneven distribution of educational quality across different regions.

Keyword: Professional Teacher Education Program, Economics Teachers, Teacher Competency,

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang fungsi strategis dalam eskalasi kualitas sumber daya manusia, terutama di tengah akselerasi globalisasi yang menuntut kemampuan adaptasi individu terhadap dinamika perubahan. Fenomena ini memosisikan mutu pendidikan dan kompetensi pendidik sebagai determinan krusial dalam memproyeksikan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, optimalisasi program pelatihan guru menjadi urgensi dalam melahirkan tenaga pendidik yang memiliki profesionalisme tinggi. Mengingat peran sentral guru sebagai pilar utama kualitas instruksional, maka penguatan skema pelatihan pendidik menjadi bagian integral dalam upaya reformasi dan perbaikan sistem pendidikan secara komprehensif.

Guru merupakan agen pedagogik yang memegang tanggung jawab dalam mentransfer diskursus keilmuan serta memberikan bimbingan intensif selama proses instruksional. Lebih dari sekadar penyampai materi, pendidik memiliki peran fundamental dalam mengonstruksi dimensi karakter, afektif, dan nilai moral peserta didik. Dalam ekosistem pendidikan modern, guru berfungsi sebagai fasilitator strategis yang mengarahkan pengembangan potensi siswa secara optimal. Oleh karena itu, tenaga pendidik diwajibkan untuk melakukan pengembangan diri berkelanjutan agar tetap sinkron dengan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sekaligus mampu mengimplementasikan metodologi pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman.

Dalam upaya memproyeksikan tenaga pendidik yang profesional, diperlukan strategi pengembangan yang sistematis dan berkesinambungan. Hal ini diaktualisasikan melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan berkualitas pada institusi pendidikan tinggi maupun lembaga terakreditasi, yang mencakup penguasaan komprehensif atas teori pendidikan, kompetensi pedagogik, manajemen kelas, serta psikologi perkembangan. Selain pendidikan formal, partisipasi aktif dalam seminar, lokakarya, dan kursus lanjutan menjadi instrumen krusial bagi guru untuk melakukan pemutakhiran terhadap dinamika pendidikan kontemporer. Lebih lanjut, integrasi pengalaman praktik mengajar terbimbing melalui supervisi oleh praktisi senior terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap eskalasi kompetensi. Terakhir, profesionalisme guru harus didukung oleh mekanisme evaluasi kinerja periodik serta pemberian umpan balik konstruktif guna menjamin kualitas instruksional yang konsisten.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan instrumen strategis dalam mengonstruksi profesionalisme pendidik di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Arifa & Prayitni (2017), PPG dirancang sebagai skema pendampingan bagi lulusan sarjana kependidikan maupun non-kependidikan untuk mencapai standar kompetensi nasional yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memvalidasi keahlian instruksional serta memberikan sertifikasi profesional yang kredibel bagi calon guru. Inisiatif tersebut merupakan manifestasi dari implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara yuridis mewajibkan penguasaan empat pilar kompetensi utama, yakni dimensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

Orientasi fundamental program PPG berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memproyeksikan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, serta memiliki integritas akhlak mulia. Secara lebih spesifik, tujuan program ini dijabarkan melalui Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2, yang menitikberatkan pada urgensi konstruksi kompetensi pendidik secara komprehensif. Dengan demikian, PPG berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk mensinergikan standar kualitas pengajaran dengan visi pembentukan karakter bangsa yang telah ditetapkan secara yuridis.

Terlepas dari kerangka regulasi yang ada, realitas empiris menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendidik di Indonesia masih memerlukan eskalasi yang signifikan. Merujuk pada data yang dipaparkan oleh Syahwal Gultom (2013), tercatat bahwa dari populasi sekitar 2,9 juta guru, baru sekitar 51% yang telah menuntaskan kualifikasi akademik strata satu (S1) atau lebih, sementara hanya 70,5% yang telah memenuhi kriteria sertifikasi profesional. Statistik ini mengindikasikan adanya gap substansial di mana sebagian besar guru belum mencapai standar profesionalisme yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipertegas oleh temuan Pangestika & Fitri (2015), yang menyatakan bahwa penguatan profesionalisme guru di Indonesia tetap menjadi tantangan krusial dalam sistem pendidikan nasional.

Sintesis dari uraian di atas menegaskan bahwa eksistensi guru profesional merupakan determinan utama dalam kualitas instruksional. Atas dasar tersebut, urgensi untuk mengkaji peran guru ekonomi lulusan PPG dalam eskalasi mutu pembelajaran di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi sangat krusial. Guru ekonomi yang telah menuntaskan program PPG diproyeksikan memiliki kematangan kompetensi dalam mengonstruksi desain pembelajaran yang inovatif, kontekstual, serta terintegrasi dengan teknologi. Kapasitas mereka diharapkan tidak terbatas pada transmisi konsep teoritis semata, melainkan juga mampu mengontekstualisasikan materi dengan fenomena ekonomi riil. Melalui kompetensi tersebut, guru ekonomi lulusan PPG diharapkan dapat mengoptimalkan proses dan capaian pembelajaran di SMA, sekaligus berkontribusi signifikan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa meskipun berbagai studi telah mengeksplorasi aspek profesionalisme guru dan implementasi program PPG secara umum, literatur yang secara spesifik menelaah peran strategis guru ekonomi lulusan PPG dalam eskalasi kualitas pembelajaran di tingkat SMA masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu segera diisi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi empiris guru lulusan PPG terhadap dinamika dan capaian proses instruksional di sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Grand Theory

a. Teori Pendidikan

Memahami Konsep Dasar dalam Pengembangan Pendidikan, Pendidikan berperan penting dalam membangun peradaban manusia. Berbagai teori dan pendekatan telah diciptakan oleh para ahli untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam. Salah satu konsep yang sering dibahas dalam ranah pendidikan adalah grand teori pendidikan. Dalam artikel ini, kita akan menelusuri apa yang dimaksud dengan grand teori pendidikan, mengapa penting untuk dikaji, serta bagaimana penerapannya dalam sistem pendidikan di berbagai negara.

Grand teori pendidikan adalah teori yang menyediakan pandangan menyeluruh dan komprehensif mengenai proses pendidikan. Teori ini merangkum kerangka konseptual yang luas, dengan tujuan menjelaskan berbagai aspek dan dinamika pendidikan, seperti tujuan, metode, evaluasi, dan hasil pendidikan itu sendiri. Grand teori ini bukan hanya sekadar pendekatan atau metode pembelajaran tertentu, melainkan lebih merupakan pandangan yang mencakup seluruh aspek pendidikan dari perspektif yang lebih luas. Berikut adalah beberapa teori besar yang populer dalam pendidikan, di antaranya:

- 1) Teori Behaviorisme
- 2) Teori Konstruktivisme

- 3) Teori Humanisme
- 4) Teori Kognitivisme
- 5) Teori Sosial-Kultural

Setiap teori ini memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana proses pendidikan seharusnya dilakukan dan apa tujuan dari pendidikan itu sendiri.

b. Teori Behaviorisme dalam Pendidikan.

Behaviorisme adalah teori besar dalam pendidikan yang menitikberatkan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari proses belajar. Tokoh utama dalam teori ini adalah John B. Watson (1913) dan B.F. Skinner (1953). Mereka meyakini bahwa semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pengkondisian, yaitu proses dimana perilaku dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Dalam konteks pendidikan, teori behaviorisme diterapkan dengan memberikan reinforcement atau penguatan. Misalnya, siswa yang menunjukkan perilaku positif akan mendapatkan penghargaan, sementara perilaku negatif akan dikenai hukuman. Metode ini digunakan untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik pada siswa.

Keunggulan dari teori behaviorisme:

- Menyediakan pendekatan yang konsisten dan bisa diukur.
- Bermanfaat untuk mempelajari keterampilan dasar yang membutuhkan pengulangan.

Kekurangan teori behaviorisme:

- Aspek kognitif dan emosional siswa kurang diperhatikan.
- Terlalu menekankan pada perilaku yang dapat diamati, sehingga mengesampingkan proses berpikir internal.

c. Teori Konstruktivisme dalam Pendidikan

- Teori konstruktivisme dipelopori oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky pada tahun 1978.
- Mereka mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, melainkan dibentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar.
- Konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki.
- Dalam pelaksanaannya, teori konstruktivisme mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan proyek.
- Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memproses dan mengembangkan pengetahuan mereka sendiri.

Kelebihan dari teori konstruktivisme adalah sebagai berikut:

- Menggalakkan pemikiran yang kritis dan kreatif.
- Membantu murid untuk memahami konsep dengan lebih mendalam melalui pengalaman langsung.

Kekurangan-kekurangan dari teori konstruktivisme:

- Proses pembelajaran memerlukan waktu yang lebih panjang.
- Tidak selalu sesuai untuk setiap jenis mata pelajaran, terutama yang memerlukan kemampuan menghafal.

d. Teori humanisme

Teori humanisme dalam diskursus pendidikan memberikan penekanan fundamental pada optimalisasi pengembangan potensi individu secara komprehensif. Dipelopori oleh Abraham Maslow (1954) dan Carl Rogers (1979), paradigma ini menitikberatkan pada konsep aktualisasi diri, yakni sebuah proses transformatif di mana individu berupaya mencapai kapasitas potensi tertingginya. Dalam perspektif humanistik, peserta didik diposisikan sebagai subjek yang unik dengan diversitas kebutuhan serta potensi yang beragam. Oleh karena itu, orientasi utama pendidikan humanisme adalah memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi serta mengaktualisasikan bakat dan minat mereka guna mencapai kemandirian intelektual maupun personal.

Kelebihan dari teori humanisme antara lain:

- Memusatkan perhatian pada pengembangan karakter dan potensi setiap individu.
- Mendorong siswa agar memiliki motivasi intrinsik dalam proses pembelajaran.

Kekurangan dari teori humanisme:

- Pendekatan yang sangat bersifat individualis mungkin sulit diterapkan dalam situasi kelas dengan jumlah siswa yang banyak.
- Sulit untuk diukur secara objektif.

e. Teori Kognitivisme dalam Pendidikan

Teori kognitivisme, yang dipelopori oleh akademisi seperti Jean Piaget (1936) dan Jerome Bruner (1960), menitikberatkan pada dinamika proses mental internal selama aktivitas instruksional, yang mencakup aspek kognisi, retensi memori, serta kemampuan pemecahan masalah. Dalam paradigma ini, pembelajaran dipandang sebagai proses asimilasi aktif di mana peserta didik mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema atau struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Implementasi metodologi berbasis kognitivisme umumnya menggunakan strategi problem-solving, penggunaan peta konsep, serta diskusi interaktif. Orientasi utama dari pendekatan ini adalah untuk mengeskalasi kapasitas berpikir kritis dan kemampuan analitis siswa secara sistematis

Kelebihan dari teori kognitivisme:

- Mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis.
- Membantu siswa dalam mempelajari metode belajar mereka sendiri.

Kelemahan dari teori kognitivisme:

- Membutuhkan pendekatan yang lebih personal, sulit untuk diterapkan di kelas yang besar.
- Tidak cukup menekankan pada aspek sosial dan emosional dalam proses pembelajaran.

f. Teori Sosial-Kultural

Teori sosial-kultural yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Vygotsky (1978) menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk melalui interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, termasuk keluarga, teman, dan guru. Dalam praktiknya, teori ini diaplikasikan melalui pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek. Guru bertindak sebagai mediator yang membantu siswa mengembangkan pemahaman melalui dialog dan diskusi.

Kelebihan teori sosial-kultural:

- Menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran.
- Mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi.

Kekurangan teori sosial-kultural:

- Diperlukan fasilitasi yang baik dari guru agar semua siswa dapat berpartisipasi.
- Pembelajaran individu tidak selalu optimal dengan pendekatan ini.

a) Penerapan Teori Utama Pendidikan dalam Sistem Pendidikan

Penerapan teori utama pendidikan dalam sistem pendidikan bergantung pada kebijakan dan filosofi pendidikan yang dipegang oleh suatu negara. Sebagai contoh Negara-negara di Skandinavia, termasuk Finlandia, menggunakan pendekatan konstruktivisme yang menitikberatkan pada pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan kerap kali menerapkan pendekatan kognitivisme, terutama di tingkat universitas, untuk mendukung pengembangan pemikiran kritis. Di Asia, terutama di Jepang dan Korea Selatan, pendidikan sering kali mengadopsi pendekatan behaviorisme untuk menjamin disiplin dan standar akademik yang tinggi.

Mengapa Penting untuk Memahami Teori Pendidikan Utama?

Penting bagi guru, pembuat kebijakan, dan orang tua untuk memahami teori pendidikan utama

karena:

- Berkontribusi dalam Perumusan Kurikulum: Dengan pemahaman dalam teori pendidikan, kita bisa merancang kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan para siswa.
- Meningkatkan Kualitas Mengajar: Para guru bisa memilih metode pengajaran yang tepat sesuai dengan teori yang mendasari proses belajar-mengajar.
- Mendukung Perkembangan Peserta Didik: Teori-teori ini membantu memahami cara belajar dan berkembangnya siswa, sehingga pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Grand teori pendidikan menawarkan pandangan holistik tentang proses pendidikan dan cara mencapai hasil yang optimal. Dari behaviorisme hingga konstruktivisme, setiap teori memberikan pendekatan berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan pendidikan. Dengan memahami berbagai grand teori tersebut, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh. Dalam era globalisasi dan digitalisasi sekarang, sistem pendidikan harus terus beradaptasi dan menggabungkan beragam teori pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan cara ini, pendidikan dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam membentuk generasi yang kompeten dan sangat berdaya saing. Sure, please provide the text you would like me to paraphrase into Indonesian.

B. Landasan Teori

Kompetensi guru merupakan landasan fundamental yang menentukan kemampuan serta kualitas dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut tercermin dalam kinerja guru dalam menjalankan perannya di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, seorang guru profesional dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di sekolah secara optimal, serta memiliki berbagai kompetensi yang mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran (Hamalik, 2008). Secara profesional, guru diharapkan memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri sekaligus bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Selain itu, guru juga harus mampu menjalankan perannya sebagai pendidik secara efektif, melaksanakan tugas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, serta berperan sebagai fasilitator yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas. Lebih lanjut, kompetensi guru mencakup tiga domain utama, yaitu aspek pengetahuan (cognitive), keterampilan (skill), dan sikap (affective). Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membentuk profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik Mulyasa, 2013. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam menyusun pengalaman belajar yang sesuai bagi setiap individu, melakukan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut untuk mampu mengelola seluruh tahapan pembelajaran secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil belajar. Selain itu, kompetensi pedagogik juga mencakup pemahaman terhadap manajemen kurikulum, kemampuan dalam mengembangkan serta mengimplementasikan kurikulum, serta penguasaan aspek psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pemahaman tersebut penting agar guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan kompetensi pedagogik. Sebagian guru belum secara konsisten menyusun dan menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam

setiap kegiatan pembelajaran, dan sering kali hanya menyusunnya untuk keperluan administratif, seperti akreditasi atau supervisi. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran masih cenderung terbatas, dengan dominasi metode konvensional dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, masih terdapat guru yang belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi potensi dan bakat peserta didik secara menyeluruh, serta belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi, terutama di daerah dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, sebagai guru abad ke-21, diperlukan peningkatan profesionalisme melalui perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis, penerapan teori pembelajaran yang relevan, pemanfaatan berbagai media pembelajaran, serta integrasi teknologi informasi guna mendukung efektivitas proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merepresentasikan dimensi intrinsik pendidik yang mencakup integritas, kematangan emosional, kearifan, serta wibawa yang memosisikan guru sebagai figur keteladanan bagi peserta didik. Secara fundamental, guru diwajibkan untuk merefleksikan perilaku yang selaras dengan norma moral, sosial, dan hukum, baik dalam lingkup institusional maupun kemasyarakatan (Mulyasa, 2013). Konstruksi ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara—*ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*—yang menegaskan peran multifungsi guru sebagai teladan, motivator, sekaligus penggerak karakter. Meskipun demikian, realitas pedagogik masih menunjukkan adanya disparitas antara standar kepribadian ideal dengan perilaku guru di lapangan. Oleh sebab itu, penguasaan sikap profesional, pengendalian diri, dan kebijaksanaan menjadi urgensi yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam konteks penelitian ini, kompetensi kepribadian menjadi pilar krusial bagi guru ekonomi lulusan PPG untuk mengonstruksi ekosistem pembelajaran yang kondusif guna mengakselerasi mutu pendidikan di SMA.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam menjalin komunikasi dan interaksi yang efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat secara luas (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005). Kompetensi ini mencerminkan kemampuan guru dalam membangun hubungan yang harmonis dan kolaboratif dalam lingkungan pendidikan. Dalam era perkembangan teknologi informasi, kompetensi sosial guru juga tercermin melalui kemampuan memanfaatkan media komunikasi digital sebagai sarana interaksi dengan peserta didik dan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan, baik melalui komunikasi rutin maupun pertemuan berkala, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan belajar siswa. Dalam konteks penelitian ini, kompetensi sosial menjadi aspek yang penting bagi Guru Ekonomi lulusan PPG, karena kemampuan berinteraksi secara efektif akan meningkatkan partisipasi peserta didik, memperkuat hubungan edukatif, serta mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas di tingkat SMA.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merefleksikan kapabilitas pendidik dalam menguasai materi instruksional secara komprehensif serta mengintegrasikannya dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi terkini (Mulyasa, 2013). Selain aspek kognitif, guru diwajibkan memiliki kemahiran dalam memproyeksikan serta mengimplementasikan strategi, metode, dan model pembelajaran yang selaras dengan profil peserta didik. Profesionalisme seorang guru tidak hanya diukur dari pemahaman substansi keilmuan, tetapi juga melalui efektivitas manajemen kelas, mencakup keterampilan membuka-menutup sesi, artikulasi pertanyaan strategis, pemberian penguatan (*reinforcement*), serta stimulasi interaksi pembelajaran (Uno, 2011). Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan hambatan sistemik, seperti

inkonsistensi antara latar belakang akademik dengan disiplin ilmu yang diampu serta keterbatasan dalam adopsi metodologi inovatif yang berdampak pada efisiensi instruksional. Oleh karena itu, eskalasi kompetensi profesional melalui pengembangan diri berkelanjutan menjadi suatu urgensi. Dalam kerangka penelitian ini, kompetensi profesional merupakan pilar fundamental bagi guru ekonomi lulusan PPG untuk mengoptimalkan mutu pembelajaran di SMA. Penguasaan teori ekonomi yang mendalam serta kemampuan mengontekstualisasikannya dengan realitas sosial akan menghasilkan proses belajar yang bermakna. Sejalan dengan teori konstruktivisme yang memandang belajar sebagai proses aktif pembangunan pengetahuan, guru ekonomi lulusan PPG berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk memahami esensi ekonomi melalui pengalaman empiris dan fenomena nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang berorientasi pada analisis dan eksplanasi fenomena berdasarkan ketersediaan data empiris. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran strategis guru ekonomi lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam eskalasi mutu pembelajaran di tingkat SMA. Melalui metodologi ini, peneliti dapat mengeksplorasi dimensi kualitatif dari kontribusi lulusan PPG yang tidak sekadar terbatas pada angka, melainkan pada esensi perubahan praktik instruksional di lingkungan sekolah.

Metodologi yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (literature review), yang dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber literatur relevan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dihimpun dari jurnal ilmiah bereputasi, referensi buku teks, serta dokumen resmi yang memiliki korelasi langsung dengan topik kajian. Proses seleksi sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kriteria relevansi konten, kredibilitas otoritas penerbit, serta aspek kemutakhiran tahun publikasi. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat validitas yang tinggi serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini diaktualisasikan melalui prosedur penelusuran, penghimpunan, dan seleksi literatur yang memiliki korelasi linear dengan fokus penelitian. Prosedur ini selaras dengan postulat Nazir (2005) yang menegaskan bahwa studi literatur berfungsi sebagai instrumen bagi peneliti untuk mendalami problematik secara komprehensif. Melalui mekanisme ini, pemahaman terhadap fenomena dapat dikonstruksi secara mendalam, sehingga memungkinkan perumusan konklusi, baik yang bersifat general maupun spesifik, secara akurat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang dioperasionalkan melalui siklus reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Prosedur ini bertujuan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan himpunan data secara sistematis guna menghasilkan konstruksi pemikiran yang komprehensif. Melalui tahapan analitis tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kontribusi strategis guru ekonomi lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam mengeskalisasi mutu instruksional pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Orientasi utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam serta pengkajian komprehensif terhadap dinamika Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen eskalasi kompetensi profesional pendidik. Secara spesifik, kajian ini difokuskan pada implikasi program tersebut dalam konteks pedagogi ekonomi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi sejauh mana efektivitas PPG dalam mengonstruksi profesionalisme guru guna menghadapi tantangan

instruksional di ruang kelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Guru Ekonomi Lulusan PPG dalam Proses Pembelajaran di SMA

Sintesis atas berbagai kajian literatur mengindikasikan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) memberikan kontribusi substansial terhadap eskalasi kompetensi pendidik secara holistik, yang mengintegrasikan dimensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Merujuk pada temuan Pangestika dan Fitri (2015), implementasi PPG terbukti berimplikasi positif terhadap penguatan profesionalisme guru, terutama dalam kapasitas memproyeksikan serta mengaktualisasikan proses instruksional secara efektif. Sejalan dengan itu, Mulyasa (2013) menegaskan bahwa penguasaan kompetensi pedagogik memungkinkan guru untuk mengelola pembelajaran secara sistematis, mencakup fase perencanaan hingga evaluasi. Hal ini teraktualisasi melalui kecenderungan guru lulusan PPG yang memiliki kemahiran lebih unggul dalam menyusun perangkat pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mengadopsi metodologi pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Dalam ruang lingkup pendidikan ekonomi di jenjang SMA, guru lulusan PPG memegang peran strategis tidak sekadar sebagai transmiter informasi, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mengontekstualisasikan doktrin ekonomi dengan fenomena empiris dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma ini selaras dengan prinsip konstruktivisme yang diusung oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yang memandang konstruksi pengetahuan sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi sosial. Dalam kerangka ini, guru berperan sentral dalam mengonstruksi ekosistem pembelajaran yang aktif, partisipatif, serta berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan peserta didik (student-centered).

2. Kontribusi Guru Ekonomi Lulusan PPG dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa guru ekonomi yang telah menuntaskan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) memberikan kontribusi substansial terhadap eskalasi kualitas instruksional. Signifikansi peran tersebut terefleksi melalui kapasitas pendidik dalam mengonstruksi proses pembelajaran yang efektif, yang diartikulasikan lewat pemilihan metodologi yang akurat, manajemen kelas yang optimal, serta stimulasi interaksi edukatif yang positif antara guru dan peserta didik. Sejalan dengan perspektif Uno (2011), tingkat profesionalisme guru merupakan determinan krusial yang menentukan keberhasilan pencapaian pembelajaran yang berkualitas tinggi.

Dalam cakrawala pendidikan ekonomi, pengembangan kapasitas berpikir kritis dan kemampuan analitis menjadi aspek fundamental yang harus dioptimalkan. Prinsip ini berkorespondensi dengan paradigma kognitivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner, yang menegaskan bahwa esensi pembelajaran terletak pada dinamika aktivitas mental, mencakup proses kognisi, pemahaman mendalam, serta resolusi masalah. Atas dasar tersebut, guru ekonomi lulusan PPG diproyeksikan memiliki kemahiran dalam mengonstruksi desain instruksional yang menstimulasi peserta didik untuk menelaah secara kritis berbagai kompleksitas ekonomi, seperti fluktuasi inflasi, problematika pengangguran, serta volatilitas dinamika pasar.

Lebih lanjut, teori sosio-kultural yang diusung oleh Lev Vygotsky menegaskan bahwa interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam konstruksi pengetahuan selama proses instruksional. Dalam kerangka ini, pendidik dengan kompetensi sosial yang mumpuni akan mampu mengonstruksi ekosistem pembelajaran kolaboratif melalui implementasi metode diskusi, kerja kelompok, maupun analisis studi kasus. Pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengeskalasi partisipasi aktif peserta didik, tetapi juga berperan krusial dalam mempertajam pemahaman kognitif mereka terhadap substansi materi yang sedang dipelajari.

3. Kendala dalam Implementasi dan Upaya Peningkatan

Sekalipun Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) memberikan kontribusi positif terhadap eskalasi kompetensi pendidik, sintesis literatur mengindikasikan bahwa implementasi praktisnya masih terbentur pada berbagai hambatan signifikan. Pangestika dan Fitri (2015) mengungkapkan adanya diskrepansi dalam pengaplikasian kompetensi pasca-PPG, di mana belum seluruh guru mampu mengaktualisasikan keahliannya secara optimal. Fenomena ini dipicu oleh faktor-faktor determinan seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya program pengembangan berkelanjutan, serta disparitas mutu pendidikan antarwilayah. Hal ini diperkuat oleh data dari Syahwal Gultom (2013) yang menunjukkan bahwa sebagian tenaga pendidik di Indonesia masih belum memenuhi standar profesionalisme, baik dari aspek kualifikasi akademik maupun kepemilikan sertifikasi profesi. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa upaya peningkatan kualitas guru merupakan tantangan krusial yang memerlukan atensi serius dalam arsitektur sistem pendidikan nasional. Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, meliputi penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi informasi, penguatan mekanisme implementasi PPG, serta dukungan konsisten dari pemerintah dan institusi terkait untuk membangun sistem pembinaan profesional yang berkelanjutan dan terstruktur.

4. Tujuan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Parafrase)

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merepresentasikan salah satu instrumen kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia guna mencetak tenaga pendidik yang kompeten dan profesional. Implementasi program ini diproyeksikan untuk mengakselerasi mutu pendidikan nasional serta mengonstruksi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing global. Hal ini selaras dengan tesis Ningrum (2012) yang menegaskan bahwa PPG memegang peran krusial dalam mengeskalasi kualitas serta performansi guru secara berkesinambungan.

Secara spesifik, program PPG diproyeksikan untuk mengonstruksi profil calon pendidik yang kapabel dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional, serta memiliki kedaulatan kompetensi dalam fase perencanaan, aktualisasi, hingga evaluasi siklus pembelajaran. Lebih lanjut, lulusan program ini diorientasikan untuk menguasai kemahiran dalam pendampingan pedagogik, pelatihan instruksional, serta keterlibatan dalam riset pendidikan sebagai instrumen esensial dalam pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan.

Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara yuridis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 2 dalam regulasi tersebut, fungsi strategis program ini mencakup: (1) internalisasi kapabilitas calon pendidik dalam merancang, mengaktualisasikan, serta mengevaluasi siklus instruksional; (2) manajemen hasil asesmen serta pemberian pendampingan dan pelatihan teknis bagi peserta didik; serta (3) eskalasi kapasitas riset guna mendukung pengembangan profesionalisme yang berkesinambungan. Penyelenggaraan program ini dimandatkan kepada perguruan tinggi yang menaungi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan kualifikasi yang telah terakreditasi sesuai standar pemerintah.

Di samping itu, penyelenggaraan PPG berpijak pada instrumen regulasi yang menjadi fundamen yuridis bagi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi sebagai koridor utama yang mengatur prinsip-prinsip fundamental operasional pendidikan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang secara spesifik mengamanatkan kualifikasi akademik serta standar kompetensi yang wajib dipenuhi untuk menyandang status

pendidik profesional. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru memberikan penegasan bahwa sertifikat pendidik sebagai bukti formal profesionalisme hanya dapat diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diakreditasi oleh pemerintah pada jenjang perguruan tinggi.

Lebih jauh lagi, implementasi PPG semakin diperkokoh oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta instrumen kebijakan pendukung lainnya, seperti Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009. Integrasi berbagai regulasi yang komprehensif ini dikonstruksi untuk menjamin optimalisasi penyelenggaraan program PPG dalam mencetak profil pendidik yang profesional, kompeten, serta memiliki resiliensi terhadap dinamika dan tuntutan perkembangan dunia pendidikan global. Kerangka yuridis tersebut memastikan bahwa setiap tahapan program memiliki standar mutu yang jelas guna menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam transformasi pendidikan.

KESIMPULAN

Profesi didefinisikan sebagai sebuah jabatan atau okupasi yang menghendaki penguasaan teoretis serta kemahiran teknis spesifik yang diakumulasi melalui proses pendidikan akademik yang komprehensif. Atas dasar tersebut, terdapat batasan distingtif di mana tidak seluruh jenis pekerjaan dapat diklasifikasikan sebagai profesi, meskipun setiap profesi pada hakikatnya merupakan bentuk pekerjaan. Predikat guru dikategorikan sebagai profesi lantaran menuntut kompetensi yang dikonstruksi melalui pendidikan dan pelatihan khusus, mengemban tanggung jawab publik yang signifikan, terikat pada kode etik profesi, serta memiliki prasyarat latar belakang pendidikan linear yang tidak dapat diabaikan.

Implementasi kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan telah disusun secara sistematis oleh pemerintah dengan mengintegrasikan dimensi filosofis, historis, yuridis, serta konseptual sebagai fundamen utamanya. Namun, dalam tataran substantif, kebijakan ini tidak luput dari kemungkinan adanya muatan ideologis tertentu, termasuk indikasi paradigma darwinisme sosial. Secara sosiologis, kondisi tersebut berisiko memicu ketimpangan struktural dan kompetisi yang asimetris, yang pada akhirnya dapat memarginalkan lulusan S-1 Kependidikan akibat adanya peluang setara yang diberikan kepada lulusan D-IV atau S-1 non-kependidikan dalam memperebutkan akses profesionalisme keguruan.

Merujuk pada temuan penelitian ini, direkomendasikan agar pemerintah beserta institusi pendidikan terkait secara konsisten melakukan evaluasi holistik dan akselerasi pengembangan program PPG. Fokus utama pengembangan tersebut harus diarahkan pada aspek pemerataan aksesibilitas, eskalasi mutu pelatihan, serta sinkronisasi kurikulum dengan dinamika kebutuhan dunia pendidikan kontemporer. Di samping itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih berkeadilan dan transparan dalam mendistribusikan kesempatan bagi lulusan kependidikan maupun non-kependidikan untuk berpartisipasi dalam program PPG, guna menjamin integritas sistem rekrutmen pendidik profesional.

Pada perspektif yang berbeda, pendidik—khususnya Guru Ekonomi yang telah tersertifikasi melalui program PPG—diwajibkan untuk secara kontinu mengeskalasi kompetensi profesional mereka melalui paradigma pembelajaran sepanjang hayat (*long-life learning*), integrasi teknologi digital, serta orisinalitas inovasi dalam metode instruksional. Upaya kolektif tersebut diproyeksikan menjadi determinan utama dalam memastikan bahwa mutu pembelajaran ekonomi pada jenjang SMA dapat terus ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan demi menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, F. N., & Prayitno, B. A. (2017). Peran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan kualitas guru. *Jurnal Pendidikan Profesi*.
- Jihan Khairani dkk. (2024) Program pendidikan profesi guru (PPG) dalam peningkatan kompetensi profesional guru. *Cemara Journal*
- Ningrum, E. (2012). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Pangestika, R. R., & Fitri, N. (2015). Evaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Pangestika, R. R., & Fitri, N. (2015). Evaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Jurnal Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru.
- Susanto, A. (2016). Manajemen peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.